



Judul : Perkuat kewenangan, BNPB diusulkan jadi kementerian
Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Kewenangan BNPB Diusulkan Jadi Kementerian

ANGGOTA Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni menyoroti lemahnya koordinasi dan kesiapan kepala daerah dalam menghadapi bencana dan jadi persoalan serius yang harus dibenahi. Apalagi ada kebangkitan sejumlah pimpinan daerah saat bencana terjadi. Padahal, sudah ada beberapa lembaga untuk merespons bencana seperti Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurutnya, banyak kepala daerah terlalu fokus pada pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi, namun lalai mempersiapkan sistem mitigasi bencana. Akibatnya, ketika bencana datang, dampaknya menjadi luar biasa, baik dari sisi korban maupun kerugian material.

Lisda juga menyayangkan adanya pernyataan pejabat terkait penanganan bencana yang justru menjadi blunder di ruang publik. "Di era media sosial, semua berbasis kenyataan. Pernyataan yang tidak hati-hati akhirnya terbantahkan oleh fakta di lapangan," katanya.

Kondisi itu mendorong Komisi VIII DPR kembali menguatkan wacana menaikkan status BNPB jadi kementerian. Dengan naiknya status jadi kementerian, BNPB bisa bertindak lebih cepat dan tepat, tanpa harus berkoordinasi ke sana-sini. Gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak periode sebelumnya, namun hingga saat ini belum terealisasi.

"Pola pikir kepala daerah juga akan berubah, bahwa bencana bukan urusan nomor sekian," tegas legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Dia mengungkapkan, pembahasan ini akan segera dibawa dalam rapat kerja DPR dengan BNPB dalam waktu dekat, bahkan berpotensi masuk agenda masa sidang berikutnya. "Kami mohon doa. *Insyallah*, ini demi perbaikan sistem penanggulangan bencana di Indonesia ke depan," katanya.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Muhammad Abdul Azis Sefudin mendorong penguatan kelembagaan dengan menaikkan status BNPB menjadi kementerian. Usulan itu muncul seiring tingginya intensitas bencana di Indonesia yang tidak sebanding dengan kapasitas SDM, anggaran, dan struktur kelembagaan BNPB saat ini.

Kata Azis, Indonesia dikelilingi cincin api sehingga tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Bahkan berdasarkan data, Indonesia termasuk negara rawan bencana nomor dua di dunia. "Maka perlu langkah serius dari Pemerintah, bangsa, dan negara," ujarnya.

Dalam kondisi itu, BNPB justru menghadapi persoalan mendasar. Mulai dari keterbatasan SDM, anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah bencana, hingga lemahnya koordinasi vertikal pusat dan daerah. Apalagi, struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berbeda-beda di tiap daerah, justru mengganggu konsistensi penanganan bencana.

"BNPB ini hanya kuat di level nasional, di daerah SDM-nya berbeda-beda. Koordinasinya panjang, membuat penanganan sering terlambat," jelas politikus PDIP itu. ■ PYB